

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Ali, Zaimuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, H. M. (2021). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astriani, Bibit Ayu., & Indrawati, Septi. (2024). *Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi. (2019). *Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Harahap, Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. (2015). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Iskandarsyah, Mudzakir. (2015). *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya hukum masyarakat yang terkena pembebasan dan pencabutan)*. Jakarta: Permata Aksara.
- Limbong, Bernhard. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

- Mahardika, Rahadian Veda, Prakoso, Bhim & Hariyani, Iswi. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. Jember: UM Jember Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media.Group
- Panjaitan, Hulman. (2014). *Kumpulan Kaidah-Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Santoso, Urip. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, Yudhi, Hadiatmodjo Boedi Djatmiko & Ropli Imam. (2018). *Hukum Administrasi Pertanahan: Teori Dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Simangunsong, Adrian Fernando. (2023). *Mengkritisi Hukum Pengadaan Tanah & Penilaian Ganti Kerugian Era UU Cipta Kerja*. Depok: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sumardjono, Maria S. W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sutedi, Adrian. (2020). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tehupeiory, Aartje. (2017). *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

B. Jurnal

Asy'ari Zaenal, A., Rahman, A. S., & Razak, A. (2024). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 318–336.

Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870–888.

Eka Cipta, S., & Ali Herdiansyah, I. (2022). Dinamika Pembangunan Tol Jagorawi 1978-1979. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9(1),

Izzati, F. R., & Rachmainy, L. (2024). *Studi Kasus Gugatan dalam Rekonvensi tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Perkara Perlawanan dalam Putusan Nomor 452 / Pdt . G / 2023 / PA JT*. 2(3), 138–149.

Hulu, Klaudius Ilkam. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27–31.

Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.

Mokodongan, R., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (2020). Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, VII No. 2(2), 126–133.

Noor, A., Hermindo, Sutiawati, Yeti, Melliana, W., & Rodiah Rohmani. (2024). Dimensi Hukum Pembebasan Lahan: Hak, Peraturan, Dan Reformasi. *Issn (E)*, 8(1), 2580–3883.

Rais, E., Alfaher, I. S., Rahmawati, R., & Vouziah, I. (2024). Penilai Berintegritas Serta Beretika. *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilaian*, 4(2), 80-92.

Temaluru, H. M., & Lay, B. P. (2023). Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 274–289.

Wasis, B. (2023). Jalan Tol, Logistik, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ramah Lingkungan Hidup. *Researchgate.Net*, August.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Indlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.